

# Dampak Hukum atas Akta Otentik yang Bertentangan (Studi Kasus Pada Perseroan Terbatas) / Quintana Dewi Andayani

Quintana Dewi Andayani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269529&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

### <b>ABSTRAK</b><br>

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia berjalan dengan sangat pesat, termasuk bidang usaha, ekonomi, perdagangan dan usaha-usaha lainnya, perkembangan ini juga dibarengi dengan perkembangan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah guna mengantisipasi adanya pelanggaran/wan prestasi, sengketa dan perselisihan dan juga untuk menjaga adanya keharmonisan suatu kerjasama antara pihak satu dengan pihak lainnya yang mengatur hak dan kewajibannya. Bagi Pelaku usaha yang tidak memahami hukum secara mendalam akan sangat menyulitkan, karena dihadapan hukum siapapun tidak dapat menghindari sanksi hukum dengan berdalih tidak mengetahui dan tidak mengerti hukum. Oleh karena itu kehadiran dan keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum yang paham hukum akan sangat membantu agar usahanya berjalan secara legal sesuai dengan perijinan yang dimilikinya, agar tidak digugat atau didakwa oleh pihak-pihak yang dirugikan. Dengan demikian peranan Notaris akan sangat menentukan khususnya bagi para pelaku usaha dan umumnya bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Untuk itulah Notaris dalam membuat akta otentik bagi pihak yang memintanya haruslah hati-hati, cermat, tegas, terbuka dan tidak memihak, menjunjung tinggi moral agar tidak melanggar peraturan, kesesilaan dan ketertiban umum sehingga akta otentik yang dibuat olehnya dapat melindungi kepentingan hukum bagi pihak-pihak yang beritikad baik. Walaupun Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 dan Kode Etik Jabatan Notaris sudah menjadi dasar hukum dan acuan serta pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban jabatannya, namun dalam prakteknya ternyata terdapat Notaris yang melanggarnya dengan mengeluarkan akta-akta otentik yang isinya saling bertentangan antara satu akta dengan akta lainnya. Melalui penyusunan tesis ini penulis menganalisa secara yuridis menggunakan data sekunder

berupa buku, artikel, peraturan perundangan dan kamus serta mewawancara beberapa Notaris, sehingga dapat disimpulkan, bahwa akta otentik yang tidak memenuhi syarat objektif adalah batal demi hukum, dan harus dimintakan melalui Hakim pengadilan Negeri oleh pihak yang dirugikan, dan selanjutnya Notaris harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan keputusan Hakim Pengadilan Negeri.

<hr>

**<b>ABSTRACT</b><br>**

Indonesia business affairs has been developing rapidly these days, including development in the entrepreneurship sector, economic, trade and other business sector. This rapid development is also accompanied by the forming of various government regulations in order to anticipate business violations, disputes and disagreement, to maintain harmony of cooperation among the parties involved and to ensure the parties shall execute their rights and obligations properly. To business practitioners who do not have good knowledge regarding laws and regulations, things can be troublesome because in front of the law anyone is considered knowledgeable and an excuse of not knowing the law is not acceptable. Therefore, the presence of notaries as public servants who are knowledgeable regarding laws will be a great help for business practitioners to seek advice so that the business can be performed in accordance with laws, regulations and licenses, and therefore the possibility of being sued by other party can be avoided. Consequently, public notaries will have a very significant role especially to business owners and to Indonesian economic growth in general. Therefore, notaries must, in making authentic deeds for those who require, be very cautious, thorough, stern, open, not taking side, take heed to moral standards, not to act against the laws, social norms and public order, so that the authentic deed being made can preserve the legal interest of the parties who have good intentions. Even though the Law of Notaries Number 30 of year 2004 and Ethical Code of Notaries have been the legality base, reference and guidance in executing professional tasks and duty, nonetheless, in day to day practice we can still find certain notaries who breach the rules, that is a Notary who issued authentic deeds that contradictory to each other in

its content. Through this thesis, writer is making analytical legal reviews using secondary data from books, articles, laws and regulations, and also by making some interviews with several notaries, from which can be concluded that an authentic deed which is not in compliance with the objective requirement of the laws and regulations shall be void, and must be solicited to the Judge of the District Court by the injured party, and further, the Notary shall be deemed responsible for the damage done in accordance to the decision of the